

# ANALISIS UPAYA INTEGRASI UKRAINA KE DALAM KEANGGOTAAN UNI EROPA

Tri Fujiarti<sup>1</sup>, Mega Nisfa Makhroja<sup>1</sup>, Pamungkas A. Dewanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

[trifujiarti97@gmail.com](mailto:trifujiarti97@gmail.com)

## ABSTRACT

*This article describes Ukraine's efforts to integrate into the European Union. Previously, Ukraine signed an association agreement between Ukraine and the European Union in 2014. The signing became the first step towards Ukraine's adjacency with the European Union. In 2022, Ukraine has received the status of a candidate for European Union membership, in which Ukraine is still experiencing Russia's invasion. President Zelensky filed an application for a Ukrainian claim on March 1, 2022 and received his candidate status on June 23, 2022. This research uses descriptive research. This study uses secondary data to collect the necessary data in the form of books, journals, articles, websites, and magazine. In analyzing Ukraine's effort to integrate into the European Union, the authors use the theory of interest groups and the concept of national interests. The interest group in this paper is the European People's Party (EPP) as a political group capable of changing EU policy in granting candidate status.*

**Key Word:** *Integration of Ukraine, Criteria Copenhagen, European Union*

## ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang upaya Ukraina dalam melakukan integrasi ke Uni Eropa, sebelumnya Ukraina sudah menandatangani perjanjian asosiasi antara Ukraina dengan Uni Eropa pada tahun 2014. Penandatanganan tersebut kemudian menjadi langkah awal kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa. Pada tahun 2022 Ukraina sudah mendapatkan *status candidat* keanggotaan Uni Eropa, dimana posisi Ukraina masih mengalami invasi Rusia. Presiden Zelensky mengajukan permohonan keanggotaan Ukraina pada tanggal 1 Maret 2022 dan telah menerima status kandidatnya pada tanggal 23 Juni 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mengumpulkan data yang diperlukan yang berupa buku, jurnal, artikel, website, dan majalah. Dalam menganalisis upaya integrasi Ukraina ke Uni Eropa penulis menggunakan teori kepentingan kelompok dan konsep kepentingan nasional. Kelompok kepentingan dalam penulisan ini adalah *European People's Party* (EPP) sebagai kelompok politik yang mampu mengubah kebijakan Uni Eropa dalam memberikan status kandidat.

**Kata Kunci :** Integrasi Ukraina, Kriteria Kopenhagen Uni Eropa

## PENDAHULUAN

Uni Eropa adalah institusi supranasional terbesar dan tertua di dunia internasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) di kawasan Eropa. Uni Eropa dalam mengimplementasikan tujuannya sudah berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan pencapaian yang

memuaskan serta menjadikan Uni Eropa sebagai institusi yang terkemuka dengan *power* yang besar dan diakui oleh dunia internasional. (Puspasari, 2020)

Sentralitas Uni Eropa dalam menjamin kesejahteraan bagi warga di negara Eropa lainnya, menjadikan banyak negara lain ingin masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa. Salah satu negara di Eropa yang ingin bergabung dengan Uni Eropa adalah Ukraina. Keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa telah ada sejak kemerdekaan Ukraina diakui oleh Uni Eropa pada tahun 1991. Namun, upaya untuk melakukan integrasi ke Uni Eropa terhambat karena belum memenuhi Kriteria Kopenhagen. Hubungan Uni Eropa dengan Ukraina dibentuk dengan adanya *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* pada tahun 1994, saat di mana Dewan Eropa mengadopsi perjanjian kemitraan dan kerjasama antara Uni Eropa dengan Ukraina. Perjanjian PCA ini dibuat untuk menggantikan perjanjian *Trade and Cooperation Agreement (TCA)* antara komunitas Eropa dan bekas Uni Soviet. Perjanjian PCA menyangkut beberapa bidang seperti, politik, ekonomi, perdagangan dan isu kemanusiaan. (European Commission, 2021)

Perjanjian antara Uni Eropa dengan Ukraina melalui PCA hanya berlaku selama satu dekade, untuk tetap menjalin hubungan kerjasama dibentuklah perjanjian baru antara Uni Eropa dengan Ukraina yang dikenal dengan *Association Agreement (AA)* atau Perjanjian Asosiasi. Perjanjian Asosiasi merupakan bentuk kerjasama antara Uni Eropa dengan negara non-Uni Eropa dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperkuat hubungan politik dan integrasi ekonomi. Didalam Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Ukraina terdapat tiga elemen penting yaitu mengenai reformasi ekonomi dengan tujuan untuk pemulihan dan penguatan dalam bidang ekonomi, dan penegakan terhadap nilai-nilai penting didalam Uni Eropa yang berupa demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Penandatanganan *Association Agreement* dilakukan oleh presiden Ukraina yaitu Petro Poroshenko pada tahun 2014. Penandatanganan perjanjian ini sebagai langkah awal Ukraina menuju keanggotaan Uni Eropa. (Welle, 2014)

Pada tahun 2019, diadakannya pemilu untuk menentukan presiden Ukraina selanjutnya, pada pemilu tersebut dimenangkan oleh Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky merupakan mantan komedian yang berhasil memenangkan kursi pemilihan presiden Ukraina dengan janjinya untuk mengakhiri konflik dengan Rusia dan menghilangkan tindakan korupsi yang ada di pemerintahan.

Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dimulai ketika Petro Poroshenko menjadi presiden Ukraina. Keinginan tersebut kemudian diteruskan oleh Volodymyr Zelensky. Pada tanggal 28 Februari 2022, Presiden Zelensky mengajukan proposal permohonan keanggotaan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. Volodymyr Zelensky memohon agar Uni Eropa secepatnya memproses keanggotaan Ukraina melalui prosedur khusus baru. Secara formal negara tersebut telah mengajukan proposal untuk bergabung dengan Uni Eropa dan berharap secepatnya untuk diterima dan berharap menjadi anggota Uni Eropa pada 2024 mendatang. (Eqqi, 2022)

Tak lama setelah Zelensky menduduki jabatan sebagai presiden, ketua Parlemen Uni Eropa, Ursula Von Der Leyen, memberikan *candidate status* keanggotaan Uni Eropa kepada Ukraina, tepatnya pada 23 Juni 2022. Pertemuan para pemimpin Uni Eropa yang ada di Brussel menyetujui proposal keanggotaan Ukraina. (Rankin, 2022) *Candidate Status* tidak

didapatkan dengan mudah. Ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi dan tidak semua negara yang mengajukan permohonan keanggotaan mendapat status tersebut.

Berdasarkan pemberian kandidat status Uni Eropa kepada Ukraina, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan Uni Eropa dalam memberikan kandidat status Uni Eropa ke Ukraina serta upaya Ukraina dalam memenuhi syarat keanggotaan Uni Eropa.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “*Penetapan Kosovo sebagai Kandidat Potensial Keanggotaan Uni Eropa*”. yang ditulis oleh Olivia Rahma Shandia, yang membahas terkait tentang pemberian status kandidat potensial keanggotaan Uni Eropa kepada Kosovo. Artikel ini menggambarkan tentang dijadikannya Kosovo menjadi kandidat potensial dikarenakan Uni Eropa berspekulasi bahwa diwilayah Balkan akan adanya warisan konflik. Artikel tersebut menjelaskan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam dua pandangan yaitu pragmatis dan normatif. Dalam pandangan pragmatis Shasdia menggunakan konsep *security-stability nexus*. Keterlibatan Uni Eropa dalam konflik tersebut disebabkan karena tujuan Uni Eropa untuk memaksimalkan keamanan dengan menjaga stabilitas di kawasan. Konsep tersebut menjadi kerangka utama dalam implementasi kebijakan Uni Eropa di wilayah lain. Sedangkan dalam aspek normatif, Shasdia melihat aktor internasional ikut terlibat aktif di wilayah Balkan Barat. Aspek normatif power tidak menggunakan militer dan ekonomi dalam mencapai tujuannya, namun lebih menggunakan ide, gagasan dan opini dalam mencapai suatu tujuan. (Shasdia, 2019)

Perbedaan artikel ini dengan penulis, artikel Shadia menggunakan konsep *security-stability nexus* untuk melihat keterlibatan Uni Eropa dalam konflik Kosovo untuk menjaga stabilitas keamanan dan dalam aspek normatif lebih mengutamakan ide dan gagasan dalam mencapai suatu tujuan. Penelitian penulis menggunakan teori kepentingan kelompok untuk melihat keterlibatannya partai politik yang mampu mengubah kebijakan Uni Eropa.

Kedua, artikel jurnal dengan judul “*Clash of Civilisations: Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa*” yang ditulis oleh Faidah Rahmi, dalam artikel tersebut Faidah menjelaskan tentang Turki dalam melakukan akses ke Uni Eropa. Turki merupakan salah satu negara kandidat Uni Eropa, upaya Turki untuk memulai akses dan negosiasi ke Uni Eropa, berupaya untuk memenuhi syarat keanggotaan Uni Eropa yaitu Kriteria Kopenhagen. Proses negosiasi Turki ke Uni Eropa masih berjalan lambat. Turki dihadap karena terdapat berbagai persoalan yang belum diselesaikan oleh Turki salah satunya mengenai hak asasi manusia (HAM) dan Turki masih terlibat konflik dengan Siprus. Negara anggota Uni Eropa juga menunjukkan sikap oposisi terhadap keanggotaan Turki. Negara anggota Uni Eropa menganggap terdapat perbedaan budaya dan sejarah antara Turki dan Uni Eropa yang memperlambat proses integrasi. (Rahim, 2013)

Faidah menggunakan konsep konstruktivisme yang menekankan hambatan akses Turki ke Uni Eropa dikarenakan adanya peradaban antara Uni Eropa dan Turki. Melihat dari sisi konstruktivisme budaya dan identitas Turki berbeda dengan Uni Eropa. Secara geografis letak wilayah Turki lebih banyak berada di benua Asia daripada Eropa. Walaupun Turki menjadi negara mayoritas muslim namun mereka mengklaim bahwa mereka merupakan bagian dari barat. Identitas sekularisme di Turki tidak mendapatkan pengakuan sepenuhnya

dalam pandangan Eropa. Walaupun Turki membangun strukturnya sebagai negara sekuler tetapi negara anggota Uni Eropa belum mempercayai hal tersebut

Ketiga, artikel dengan judul "*Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa*" yang di tulis oleh Yozar Qohari Bil Ikhsan yang membahas tentang akses Turki ke Uni Eropa tidak berjalan lancar. Dalam proses akses Turki ke Uni Eropa, Turki berupaya untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen yang menjadi syarat keanggotaan. Ikhsan menjelaskan upaya yang dilakukan Turki dalam memenuhi kriteria yang menjadi persyaratan keanggotaan Uni Eropa. Mulai dari upaya demokrasi, Turki berupaya untuk membuka akses peradilan publik, mengurangi kewenangan hakim untuk menjamin peradilan yang independen. Turki juga memberikan hak untuk individu dalam mengajukan petisi. Dalam memenuhi kriteria politik khususnya mengenai hak asasi manusia, Turki berupaya untuk memberikan jaminan hak penyandang cacat untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran bagi penyandang cacat. (Ikhsan, 2019)

Penelitian ini menggunakan konsep liberalisme, Ikhsan menjelaskan dari sudut pandang Uni Eropa. Uni Eropa melihat upaya Turki dalam melakukan akses belum memenuhi kriteria. Dalam upaya demokratisasi, Uni Eropa melihat Turki kurang memberikan keseimbangan gender di Parlemen. Uni Eropa menilai peran perempuan dalam Parlemen Turki kurang terwakilkan. Dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) Uni Eropa melihat bahwa Turki belum memenuhi hak-hak kaum minoritas dan terdapat diskriminasi terhadap LGBT dan Turki merupakan negara yang menempati peringkat terendah dalam penghormatan terhadap hak asasi LGBT. Dalam pandangan tersebut, hal ini yang kemudian membuat akses Turki menjadi anggota Uni Eropa terhambat.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul "*Proses Pengajuan Bosnia Herzegovina Menjadi Anggota Uni Eropa*" yang ditulis oleh Denada Faraswacyen L. Gaol, yang membahas mengenai upaya Bosnia untuk menjadi anggota Uni Eropa. Proses Bosnia Herzegovina menjadi anggota Uni Eropa harus memenuhi persyaratan dan kriteria Uni Eropa yang sudah diatur dalam Kriteria Kopenhagen. Dalam hal ini Bosnia Herzegovina masih belum memenuhi beberapa kriteria diantaranya kriteria politik dan ekonomi. Bosnia Herzegovina masih melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan terdapat kasus mengenai kemanusiaan. Kriteria politik menjadi penting untuk negara kandidat, hal ini kemudian menekankan agar Bosnia Herzegovina memiliki lembaga stabilitas yang mampu menjamin demokrasi, supremasi hukum dan penghormatan terhadap kelompok minoritas dan hak asasi manusia (HAM). (Gaol, 2016)

Gaol menggunakan konsep eropanisasi, yang berisi tentang upaya Bosnia Herzegovina dalam mendapatkan status keanggotaan Uni Eropa dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Uni Eropa, tetapi Uni Eropa melihat Bosnia Herzegovina masih belum memenuhi syarat yang sudah tercantum dalam Kriteria Kopenhagen. Hal ini yang menyebabkan proses pengajuan Bosnia untuk menjadi anggota Uni Eropa belum diterima sepenuhnya karena belum memenuhi kriteria.

Kelima, artikel jurnal dengan judul "*Kepentingan Uni Eropa dalam Enlargement Kroasia 2013*" yang ditulis oleh Agnezia Kartika Dewi, yang menjelaskan tentang kepentingan Uni Eropa menerima keanggotaan Kroasia menjadi anggota Uni Eropa. Kroasia merupakan negara Balkan Barat yang sudah masuk dalam keanggotaan resmi Uni Eropa. Meskipun Kroasia masih belum memenuhi beberapa kriteria terutama dalam peradilan,

penanganan korupsi dan hak fundamental. Uni Eropa menerima keanggotaan Kroasia setelah mendorong transformasi Kroasia dan negara Balkan menuju perspektif Eropa dan mengikuti norma Uni Eropa dengan inisiatif bantuan teknik dan administrasi. (Dewi, 2016)

Artikel tersebut menggunakan teori *enlargement* dan supranasionalisme institusi. Artikel ini membahas kebijakan Uni Eropa menerima keanggotaan Kroasia walaupun belum memenuhi kriteria didasari karena adanya kepentingan untuk menjadikan proses akses Kroasia sebagai pilot untuk perluasan Uni Eropa di wilayah Balkan serta untuk meningkatkan kredibilitas perluasan di negara Balkan. Perbedaan artikel ini dengan penulis, artikel ini lebih membahas keuntungan yang akan didapatkan Ketika Uni Eropa menerima anggota baru.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan, tidak berupa angka dalam proses penelitian. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena, analisis dan ketajaman penelitian. Penelitian kualitatif berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. (Ardianto, 2019) Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu data sekunder atau kepustakaan sebagai teknik yang digunakan untuk mencari informasi, menggunakan berita analisis dengan menggunakan konsep dari para ahli yang berbentuk buku, jurnal, artikel atau media massa yang berkaitan dengan tema yang penulis yang dibahas dalam melakukan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan teknik dari Miles dan Huberman dengan model analisis berbasis *interactive model* yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **TEORI KEPENTINGAN KELOMPOK (*INTEREST GROUP*)**

Menurut Theodore M. Benditt, kelompok kepentingan (*interest group*) didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lain. (Benditt, 1975) Melalui definisi tersebut kelompok kepentingan merupakan kelompok terorganisir yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah agar sesuai dengan keinginan dari kelompok kepentingan sesuai yang diwakilinya. (Janda, K., Berry, J., & Goldman, 1997)

Kelompok kepentingan merupakan bagian dari pendirian politik pada saat ini. Dalam demokrasi liberal di seluruh dunia, memungkinkan kelompok-kelompok kepentingan tumbuh dan memberikan pengaruh yang luas dalam mempengaruhi kepentingan nasional terutama dalam organisasi regional dan internasional. Kelompok kepentingan dibagi menjadi dua kelompok yaitu 1) Kelompok yang mewakili kepentingan ekonomi khusus. 2) Kepentingan komersial seperti organisasi sukarela yang mengadvokasi isu-isu publik berupa kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen. (Farah, 2005)

Ada dua strategi utama yang dilakukan oleh kelompok kepentingan yaitu rute nasional dan strategi brussels. Pada rute nasional kelompok kepentingan mencoba mempengaruhi keputusan Uni Eropa melalui pemerintah nasional atau melalui negara perwakilan di Uni

Eropa yang dikenal dengan *Committee of Permanent Representatives* (COREPER) yang bekerjasama dengan komisi untuk menyiapkan draft proposal untuk Dewan Uni Eropa. Sedangkan strategi brussels yaitu Uni Eropa secara langsung mendirikan perwakilan mereka sendiri di Brussels. Dengan cara melobi, melobi merupakan praktik advokasi pribadi dengan tujuan mempengaruhi badan pengatur untuk memastikan sudut pandang individu atau organisasi perwakilan dalam pemerintah. (Greenwood, 2003)

Menurut Gabriel A. Almond ada empat bentuk dari kelompok kepentingan, dari keempat bentuk kelompok kepentingan penulis menggunakan kelompok institusional dalam menganalisis kelompok kepentingan yang mampu mengubah kebijakan Uni Eropa. Kelompok institusional: kelompok yang mampu mempengaruhi pemerintah biasanya berupa partai politik, korporasi bisnis dan legislatif. Dalam hal ini kelompok institusional yang penulis gunakan yaitu *European People's Party* (EPP) yang mampu mengubah kebijakan Uni Eropa.

### KONSEP KEPENTINGAN NASIONAL (*NASIONAL INTEREST*)

Konsep Kepentingan Nasional merupakan salah satu konsep yang ada di dalam ilmu hubungan internasional. Konsep ini mempelajari tentang keberlangsungan hidup suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional mereka. Dengan tercapainya suatu kepentingan maka negara akan berjalan dengan stabil mulai dari segi politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan hal ini dilakukan oleh suatu negara untuk bertahan serta menjamin keberlangsungan hidup bangsanya. Dalam dunia internasional banyak negara yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Negara akan melakukan suatu hal yang tidak bisa mereka lakukan seperti melindungi identitas politik dan budaya mereka dari perambahan negara lain. (Suwarman, n.d.) sehingga hal inilah yang membuat negara ingin melakukan hubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasional dengan tujuan menciptakan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Donald E. Nuechterlein kepentingan nasional merupakan suatu kebutuhan negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain yang didasarkan oleh kondisi lingkungan eksternal dan internal. Kondisi eksternal yang dimaksud ialah kondisi dari pengaruh sistem dunia internasional sedangkan kondisi internal lebih melihat kepentingan umum suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, (Nuechterlein, 1979) Nuechterlein juga mengemukakan terdapat 4 dasar suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasional mereka sebagai berikut.

- 1) Kepentingan Pertahanan adalah kepentingan suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil ketika mengalami ancaman eksternal maupun internal.
- 2) Kepentingan Ekonomi adalah kepentingan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Kepentingan Tatanan Dunia adalah kepentingan negara dalam mempertahankan kestabilan politik internasional dan sistem ekonomi.
- 4) Kepentingan Ideologi adalah kepentingan dari suatu negara untuk melindungi nilai-nilai dan norma yang dianut oleh suatu negara.

Penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dari Donald E. Nuechterlein untuk melihat kepentingan nasional Ukraina dalam melakukan integrasi ke Uni Eropa. Dalam konteks ini ada empat kepentingan nasional Ukraina yang berupa kepentingan politik, ekonomi, pertahanan dan kepentingan ideologi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PERLUASAN KEANGGOTAAN UNI EROPA**

Perluasan merupakan agenda penting Uni Eropa ketika suatu negara ingin bergabung dengan Uni Eropa. Dalam Perjanjian Maastricht pasal 49 menyatakan bahwa: Negara Eropa yang menghormati nilai-nilai Uni Eropa serta berkomitmen untuk mempromosikannya dapat mengajukan permohonan keanggotaan kepada Uni Eropa. Melalui perluasan Uni Eropa mampu memberikan dorongan terhadap integrasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan perluasan ini memudahkan Uni Eropa untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan negara kandidat yang akan meningkatkan jaminan sosial warga Uni Eropa. (Gjeta, 2020)

Berdasarkan kerangka umum Kriteria Kopenhagen mengenai kebijakan perluasan Dewan Eropa menekankan perlunya konsensus baru tentang perluasan dan persyaratan yang adil dan ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan Uni Eropa mempertahankan dan memperdalam pembangunannya sendiri untuk mengintegrasikan anggota baru. Pada tanggal 13 Desember 2022 dilakukannya ratifikasi pada kebijakan perluasan untuk berfokus pada reformasi fundamental yang bertujuan dalam proses akses dengan membuatnya lebih kredibel dan dinamis serta tunduk pada politik yang kuat. Kebijakan perluasan Uni Eropa menjadi pondasi yang kuat untuk perdamaian, demokrasi, kemakmuran, keamanan dan stabilitas negara. (European Commission, n.d.)

Perluasan Uni Eropa mendorong Uni Eropa untuk mendapatkan beberapa keuntungan sebagai berikut.

- 1) Untuk meningkatkan keamanan dan perdamaian masyarakat Eropa melalui perluasan untuk stabilitas dan kesejahteraan Eropa.
- 2) Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Eropa dan menciptakan lapangan kerja untuk negara non-anggota Uni Eropa dan anggota Uni Eropa.
- 3) Untuk mendatangkan kehidupan yang baik bagi seluruh anggota dan non-anggota Uni Eropa dan untuk memberikan perlindungan dan perlawanan terhadap tindakan kriminalitas, obat-obatan dan imigrasi ilegal di Eropa.
- 4) Untuk memperkuat peran Uni Eropa di dunia internasional dalam kebijakan luar negeri dan keamanan dan untuk memperkuat ekonomi Uni Eropa.

Dalam konteks Ukraina, melalui konsep kepentingan nasional ada beberapa kepentingan Ukraina dalam melakukan integrasi ke Uni Eropa.

1. Kepentingan politik, untuk memperdalam hubungan politik Ukraina dengan Uni Eropa dan meningkatkan konvergensi dalam kebijakan politik dan keamanan. Kepentingan lainnya untuk mensatilitas keamanan internasional yang didasarkan multilateralisme yang efektif dan untuk memperkuat kerjasama antara Ukraina dengan Uni Eropa dalam menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan di Eropa. (European External Action Service, 2014)

2. Kepentingan ekonomi, berupa penghapusan bea masuk terhadap barang impor yang masuk ke pasar masing-masing. Penyelaran aturan berupa peraturan teknis, prosedur dan tindakan sanitasi serta fotosanitasi Ukraina dan keamanan pangan dengan aturan Uni Eropa, sehingga industri dan produk pertanian dari Ukraina tidak memerlukan sertifikasi tambahan dari Uni Eropa. Kepentingan Ukraina lainnya untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual Ukraina dan pengandaan publik Ukraina untuk membuka pasar Uni Eropa untuk bisnis Ukraina. Melalui Perjanjian Asosiasi Uni Eropa mengizinkan barang yang berasal dari negara anggota untuk di proses di Ukraina kemudian di ekspor kembali ke Uni Eropa. (Szyszczak, 2022)
3. Kepentingan pertahanan, untuk meningkatkan dialog kerjasama Ukraina dengan Uni Eropa mengenai migrasi dan pencari suaka serta pengenalan kebijakan bebas visa bagi warga negara Ukraina dan berkomitmen dalam memerangi kejahatan terorganisir dan pencucian uang. Kepentingan pertahanan lainnya untuk mengurangi pasokan permintaan obat-obatan terlarang dengan meningkatkan kerjasama untuk melawan tindakan terorisme.
4. Kepentingan ideologi, untuk memperkuat penghormatan Ukraina terhadap nilai-nilai Uni Eropa dan penghormatan terhadap keragaman dan ikut berkontribusi pada reformasi politik dalam negeri.

## PENDEKATAN DUA REZIM KEPEMIMPINAN UKRAINA DALAM UPAYA INTEGRASI KE UNI EROPA

### KEPEMIMPINAN PETRO POROSHENKO

Pada masa pemerintahan Petro Poroshenko dilakukannya penandatanganan *Association Agreement* (AA) atau dalam bahasa indonesianya dikenal dengan Perjanjian Asosiasi. Penandatanganan Perjanjian Asosiasi dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014 yang dilakukan oleh seluruh negara anggota Uni Eropa, *European Atomic Energy Community* (EURATOM) dan Ukraina. Perjanjian ini berisi tentang berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai bidang seperti kerjasama ekonomi, politik, keadilan dan kebijakan luar negeri. Perjanjian ini dibentuk untuk menghubungkan semua anggota negara yang melakukan penandatanganan melalui pembangunan asosiasi politik dan asosiasi ekonomi dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara Ukraina dengan Uni Eropa dalam bidang politik dan ekonomi. (Wolczuk, 2014)

Penandatanganan Perjanjian Asosiasi dilakukan oleh Ukraina dikarenakan pada tahun 2014 Ukraina mengalami krisis politik dan ekonomi. Ukraina mengalami krisis ekonomi dimana jumlah utang mengalami peningkatan sebesar 54,2% yang awalnya sejumlah 40,7% meningkat menjadi 94,9% dari total PDB negara. *International Monetary Fund* (IMF) menawarkan pinjaman sebesar \$17,5 miliar kepada Ukraina dalam jangka waktu 4 tahun. Bantuan yang diberikan oleh IMF sebagian besar merupakan dana dari Uni Eropa. Hal ini kemudian membuat Ukraina menganggap Uni Eropa mampu menjadi penolong untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Ukraina.

Penandatanganan perjanjian ini menjadi tanda kedekatan antara Uni Eropa dan Ukraina. Presiden Petro Poroshenko lebih cenderung ke Uni Eropa dan NATO. Penandatanganan perjanjian ini diberlakukan pada tanggal 1 September 2014, dan mengalami ratifikasi pada tanggal 1 September 2017. (Jozwiak, n.d.) Perjanjian ini mencangkup juga *Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA) yang memiliki tujuan untuk



meningkatkan perekonomian. Perjanjian Asosiasi antara Ukraina dengan Uni Eropa diharapkan mampu untuk menstabilkan politik dan ekonomi Ukraina. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan Ukraina mampu lebih dekat dengan sistem demokrasi yang mapan dan berusaha untuk meningkatkan kestabilan di perbatasan.

#### KEPEMIMPINAN VOLODYMYR ZELENSKY

Volodymyr Zelensky merupakan seorang komedian yang memenangkan kursi presiden Ukraina pada tahun 2019. Sistem pemerintahan Ukraina mempunyai kekuasaan konstitusional yang terbatas pada sistem Republik Parlemeter-Presidensial. Presiden Volodymyr Zelensky juga mendapatkan dukungan parlemen dari "Sluha Narodu" yang memperoleh 252 kursi dan memilih sendiri perdana menteri. Shuha Narodu merupakan partai politik baru di Ukraina yang dibuat oleh Volodymyr Zelensky. Dukungan suara dominan ini mendorong Zelensky untuk melakukan perombakan institusi negara dan mendorong agenda reformasi yang komprehensif. Secara *de-jure* pemerintah memiliki otoritas besar dalam pengawasan terhadap badan pengatur dan eksekutif utama. Sedangkan secara *de-facto* Zelensky dan kantor presiden Ukraina mampu memperluas kekuasaan secara signifikan dengan menerapkan kontrol atas institusi politik dan penegakan hukum. (Litra & Getmanchuk, 2020)

Upaya Presiden Zelensky dalam integrasi Ukraina kedalam keanggotaan Uni Eropa yaitu ia mampu mendorong Ukraina untuk terus mendekatkan diri pada Uni Eropa dan memperoleh *candidate status*. Politik luar negeri yang dipakai oleh Presiden Zelensky yaitu menggunakan diplomasi, dimana Zelensky menjalin hubungan personal dengan pemimpin internasional dan berfokus untuk membuat hubungan bilateral dengan negara anggota Uni Eropa seperti Jerman, Prancis dan Italia. Dengan adanya dukungan dan dorongan dari negara-negara Uni Eropa membuat Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa. Kemudian Presiden Volodymyr Zelensky mengirimkan proposal keanggotaannya pada tanggal 28 Februari 2022. Pada tanggal 17 Juni 2022 proposal keanggotaan Ukraina diterima oleh ketua Uni Eropa yang kemudian didiskusikan oleh para anggota Uni Eropa untuk menentukan tahap selanjutnya. Pada tanggal 23 Juni 2022 Komisi Eropa memutuskan untuk memberikan status kandidat keanggotaan Uni Eropa kepada Ukraina.

#### FAKTOR EKSTERNAL PENDORONG PEMBERIAN KANDIDAT STATUS

##### INVASI RUSIA KE UKRAINA

Faktor pertama yang melandasi diberikannya *candidate status* adalah karena terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Konflik antara Rusia dengan Ukraina masih terjadi dimana Rusia melakukan invasi ke Ukraina yang menyebabkan banyaknya masyarakat sipil tewas dan infrastruktur yang rusak akibat dari invasi Rusia. Awal mulanya invasi Rusia ke Ukraina disebabkan karena tindakan Presiden Zelensky yang menindak orang-orang yang pro Rusia. Tindakan yang dilakukan Zelensky membuat Putin bereaksi untuk mengerahkan pasukannya ke perbatasan Ukraina. Serta Rusia meminta agar NATO tidak menerima Ukraina sebagai bagian dari NATO, namun permintaan Rusia tersebut tidak diterima oleh Amerika Serikat.

Upaya mencegah invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat memberlakukan sanksi kepada Rusia dengan memblokir bank Rusia dan menghentikan penjualan obligasi Rusia. Pada tanggal 23 Februari 2022 Uni Eropa melakukan hal yang

sama yaitu membekukan aset dari 351 anggota majelis Rusia. Hingga pada akhirnya pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina yang kemudian mendapatkan respon dari dunia internasional serta mendapat kecaman dari beberapa negara di dunia. Dewan keamanan PBB memberikan responnya untuk meminta Rusia untuk keluar dari Ukraina, selain itu Uni Eropa juga memberikan sanksi kepada Putin atas konflik yang terjadi yang menimbulkan banyak sekali pengungsi yang mencoba melarikan diri ke negara tetangga yang dianggap aman.

Pada tanggal 28 Februari 2022, Presiden Zelensky mengajukan proposal permohonan keanggotaan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. Presiden Zelensky telah mengajukan proposal keanggotaannya untuk bergabung dengan Uni Eropa. (Eqqi, 2022) Pada tanggal 23 Juni 2022 pemimpin Uni Eropa Ursula Von Der Leyen mengumumkan untuk memberikan status kandidat kepada Ukraina, Moldova dan Georgia. (Rankin, 2022) Emmanuel Macron juga menyatakan bahwa belum pernah terjadi negara-negara anggota Uni Eropa bereaksi cepat terhadap permohonan keanggotaan Uni Eropa untuk memberikan status kandidat kepada negara calon, keputusan para pemimpin Uni Eropa selama KTT, tidak mungkin terjadi tanpa perang di Ukraina dan perjuangan rakyatnya untuk mempertahankan nilai-nilai Uni Eropa, kedaulatan dan integrasi Ukraina. (Sapir, 2022)

Kebijakan Uni Eropa untuk memberikan status kandidatnya kepada Ukraina juga didasarkan pada invasi Rusia dan Ukraina dikarenakan situasi politik yang tidak stabil, sehingga Uni Eropa juga harus menjaga stabilitas negara kawasannya agar tetap aman dari invasi Rusia, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa negara anggota Uni Eropa berbatasan langsung dengan Rusia dan Ukraina sehingga membuat Uni Eropa harus menjaga stabilitas negara kawasannya agar tetap aman, dengan begitu terjadinya invasi Rusia ke Uni Eropa mampu mengubah kebijakan Uni Eropa untuk memberikan status kandidatnya kepada Uni Eropa.

#### DUKUNGAN *EUROPEAN PEOPLE'S PARTY* (EPP)

Alasan penting kedua yang mempengaruhi kebijakan Uni Eropa dalam mengeluarkan kebijakannya adalah adanya kelompok kepentingan, dalam hal ini adalah *European People's Party* (EPP). Kelompok kepentingan merupakan salah satu bagian dari pendirian politik, di dalam demokrasi liberal, dimana kelompok kepentingan tumbuh serta memberikan pengaruh dalam kepentingan nasional terutama dalam organisasi regional maupun internasional. Menurut Gabriel A. Almond ada empat bentuk dari kelompok kepentingan yaitu kelompok anomik, kelompok non-asosiasi, kelompok institusional dan kelompok asosiasional. (Egyankosh.ac, n.d.) Dari keempat jenis kelompok kepentingan ini, kelompok institusional merupakan jenis kelompok kepentingan yang berkontribusi dalam pemberian *candidate status* Ukraina dalam Uni Eropa. Kelompok institusional merupakan partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif. Kelompok ini berpengaruh kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah karena memiliki basis yang kuat. Salah satu partai politik yang dapat mempengaruhi kebijakan Uni Eropa adalah *European People's Party* (EPP).

*European People's Party* (EPP) adalah kelompok terbesar dan tertua yang ada di parlemen Eropa. Kelompok ini dibuat oleh Robert Schuman, Alcide De Gasperi dan Konrad Adenauer. Kelompok ini memiliki komitmen untuk menciptakan Eropa yang kuat, yang dibangun di atas rakyatnya. Dengan slogan rakyat kita adalah ekonomi kita, rakyat Eropa adalah ekonomi terbesar di dunia. Tujuan dari kelompok ini untuk menciptakan Eropa yang

kompetitif dan demokratis.(Party, n.d.-a) Anggota Parlemen Eropa diorganisasikan berdasarkan afiliasi politik daripada negara dan hanya boleh bergabung dengan satu kelompok politik. EPP adalah kelompok politik yang terbesar dari delapan politik di Parlemen Eropa dan anggota EPP dipilih untuk mewakili kepentingan nasional di tingkat Eropa yang dipandu oleh posisi keseluruhan kelompok EPP.(Party, n.d.-b)

Pada saat pemberian status kandidat kepada Ukraina jumlah suara yang mendukung Ukraina untuk masuk ke Uni Eropa sebanyak 529 suara berbanding 45 dan 14 suara abstain. Parlemen mengadopsi resolusi yang meminta kepala negara atau pemerintah mengadakan pertemuan untuk memberikan status kandidat kepada Ukraina dan Moldova tanpa penundaan. Pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, EPP menyerukan untuk memberikan status kandidat kepada Ukraina.(Fund, 2011) EPP juga mendukung akses Ukraina ke Uni Eropa dan meminta agar lembaga Uni Eropa berupaya memberikan status kandidat Uni Eropa ke Ukraina sesuai dengan pasal 49 perjanjian dan berdasarkan kemampuannya sendiri.(Party, 2022b) Rakyat Ukraina membela diri untuk mendapatkan penghormatan serta dukungan dari seluruh dunia. Ukraina juga bebas memilih dan menentukan masa depannya untuk kedua kalinya. Hal ini kemudian membuat rakyat Ukraina harus membuktikan dedikasi mereka terhadap kebebasan dan demokrasi untuk menjadi anggota Uni Eropa.(Party, n.d.-c)

Grup EPP mendukung Ukraina dan pemerintahan demokratisnya sejak awal perang dan bersikeras untuk mengambil tindakan untuk melawan kejahatan internasional yang dilakukan oleh Rusia. EPP adalah salah satu kelompok politik yang pertama menyerukan embargo minyak, batu bara, bahan bakar nuklir dan gas Rusia serta kebijakan untuk mengunci bank-bank Rusia dari sistem *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)*. Kebijakan tersebut kemudian diterima dan diterapkan oleh Uni Eropa.(Party, 2022c)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa bukan sepenuhnya atas dasar kepentingan sendiri namun terdapat juga suatu kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh besar dalam mengubah kebijakan Uni Eropa salah satunya kelompok EPP, seruan embargo minyak yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada Rusia juga tidak lepas dari keterlibatan kelompok EPP. Dengan kata lain EPP memiliki peran yang penting dalam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Uni Eropa.

Tabel akses Uni Eropa

No	Tahap Akses Uni Eropa	Timeline
1	Negara mengajukan permohonan kepada Dewan Eropa	28 Februari 2022
2	Komisi mengajukan opini atas permohonan yang diajukan	17 Juni 2022
3	Negara anggota Uni Eropa memutuskan dengan suara bulat untuk memberikan <i>candidate status</i>	23 Juni 2022
4	Setelah persyaratan terpenuhi, terjadi negosiasi akses dibuka dengan persetujuan semua negara anggota.	

5	Komisi mengusulkan rancangan negosiasi sebagai dasar pembicaraan yang harus diterima oleh negara anggota.	
6	Selama negosiasi yang terstruktur, negara kandidat bersiap menerapkan Undang-Undang negara Uni Eropa. Dengan ketentuan semua anggota Uni Eropa memiliki suara bukat dan menyetujui persyaratan yang dipenuhi dalam setiap kasus.	
7	Setelah semua negosiasi disemua bidang diselesaikan. Komisi memberikan pendapatnya tentang kesiapan negara yang menjadi kandidat.	
8	Berdasarkan opini tersebut, negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk menutup negosiasi. dan parlemen harus memberikan persetujuan.	
9	Terakhir semua negara anggota Uni Eropa dan negara calon menandatangani dan meratifikasi perjanjian akses untuk menjadikan negara kandidat menjadi anggota resmi Uni Eropa.	

Jika dilihat dari tabel akses Uni Eropa, posisi Ukraina berada di posisi ketiga, dimana Ukraina telah mendapatkan status kandidatnya. Posisi Ukraina sekarang berada sama dengan negara kandidat lainnya seperti Albania, Montenegro, Makedonia Utara, Serbia dan Turki.

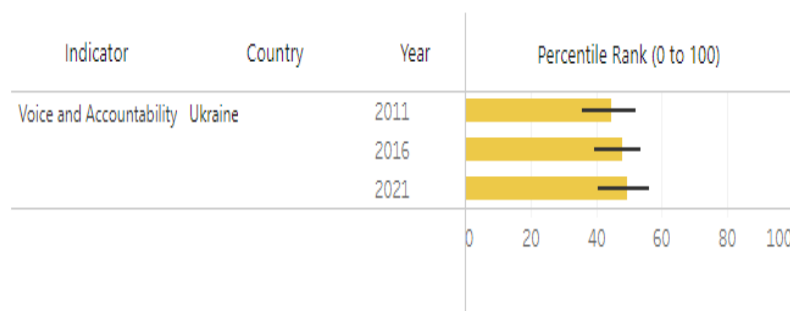
#### ANALISIS UPAYA INTEGRASI UKRAINA KE DALAM KEANGGOTAAN UNI EROPA

Pada subab ini penulis menganalisis tentang terkait proposal keanggotaan Ukraina ke Uni Eropa berdasarkan sumber dari data *Worldwide Governance Indicators (WGI)*. Data dari WGI penulis gunakan untuk melihat apakah Ukraina sudah memenuhi Kriteria Kopenhagen yang menjadi syarat keanggotaan Uni Eropa khususnya dalam memenuhi kriteria politik.

#### KRITERIA POLITIK

- 1) Demokasi : Menurut data dari Uni Eropa mengenai proposal Ukraina atas keanggotaan Uni Eropa. Ukraina sudah melakukan beberapa kali ratifikasi terhadap demokrasi. Menurut *Worldwide Governance Indicator (WGI)* Ukraina dalam implementasi hak dan kebebasan bersuara di Ukraina masih rendah belum bisa mencapai angka 50%. Persentase Ukraina mengenai voice and accountability pada tahun 2011 dengan poin 44.60%, pada tahun 2016 dengan poin 47.78% dan pada tahun 2021 dengan poin 49.28%.(Indicators, n.d.)

Grafik 1. Persentase suara dan akuntabilitas Ukraina



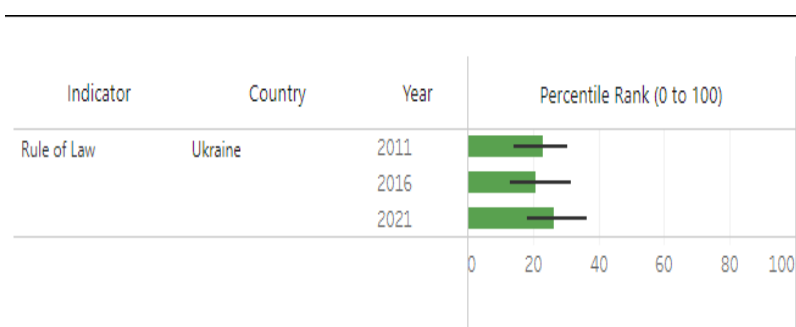
Sumber: *Worldwide Governance Indicator (WGI)*

Berdasarkan grafik 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa suara dan akuntabilitas Ukraina masih rendah. Rata-rata negara anggota Uni Eropa dalam indikator suara dan akuntabilitas berada di poin lebih dari 50% sedangkan poin Ukraina pada tahun 2021 sebesar 49.28%. Dalam demokrasi Ukraina sudah memperkuat kouta gender, namun tingkat diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi. Dalam kebebasan bersuara masih terjadi tindakan diskriminasi menurut dari OHCHR beberapa aktifis seperti ham, reporter, kelompok LGBT menerima tindakan diskriminasi dari individu maupun kelompok.

2) Supremasi Hukum

- a) *Peradilan*: Dalam pengesahan undang-undang, ada beberapa undang-undang Ukraina yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan hak asasi manusia (HAM). Undang-undang anti diskriminasi, undang-undang ini disahkan namun undang-undang ini tidak memberikan sanksi yang khusus. Terdapat pula undang-undang bahasa, yang mengharuskan menggunakan bahasa Ukraina sebagai bahasa nasional, hal ini termasuk tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Grafik 2. Persentase supremasi hukum Ukraina



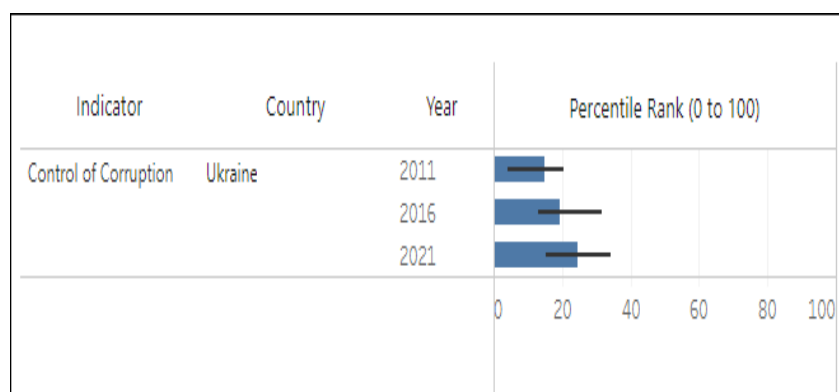
Sumber: *Worldwide Governance Indicator (WGI)*

Berdasarkan dari data WGI poin Ukraina pada indicator supremasi hukum pada tahun 2011 dengan poin 23%, pada tahun 2016 poin 20.67% dan pada tahun 2021 poin 26.44%. Melihat dari data WGI supremasi hukum di Ukraina masih lemah, terdapat pula tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh peradilan.

Banyaknya pengadilan yang korup juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sangat lemah.

- b) *Kontrol Korupsi*: Berdasarkan dari data WGI tingkat korupsi di Ukraina sangat tinggi dan hal tersebut menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan oleh Ukraina dikarenakan banyaknya pemerintahan yang melakukan korupsi. Berdasarkan grafik 3 mengenai indikator dalam menangani korupsi pada tahun 2011 dengan poin 14.69%, pada tahun 2016 poin 19.23% dan pada tahun 2021 poin 24.52%. Ukraina menggunakan sistem elektronik dalam menangani kasus korupsi namun tingkat korupsi di pemerintah masih terjadi. NABU sebagai badan yang menangani korupsi melaporkan penangkapan perdana menteri Ukraina Vasyl Lozynkiy yang melakukan tindakan korupsi dan menerima suap sebesar US\$400. (Indonesia, 2023)

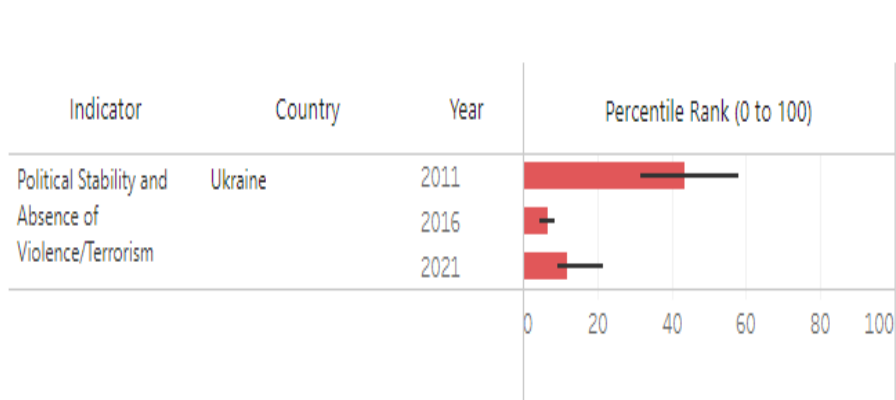
Grafik 3. Persentase kontrol korupsi Ukraina



Sumber: Worldwide Governance Indicator (WGI)

- c) *Kejahatan Terorganisir*: Dalam mengatasi tindak kriminal dan kejahatan, Ukraina masih sangat rendah dapat dilihat dari data WGI sebagai berikut.

Grafik 4. Perentase stabilitas politik dan ketidakadaan kekerasan atau terorisme Ukraina



Sumber: Worldwide Governance Indicator (WGI)

Berdasarkan grafik 4 diatas, dalam memenuhi kriteria politik yang menjadi salah satu syarat keanggotaan Uni Eropa, Ukraina masih belum memenuhi syarat. Dimana

dalam supremasi hukum implementasinya masih kurang. Indeks skor Ukraina menurut data WGI pada tahun 2021 dalam menangani terorisme dengan poin 11.79% sangat kurang. Walaupun Ukraina sudah melakukan reformasi besar-besaran terhadap kepolisiannya. Namun, data WGI menunjukkan dari semua indikator yang ada, Ukraina masih sangat lemah dalam menangani tindakan kriminalitas dan terorisme.

- 3) Hak Asasi Manusia : Ukraina sudah melakukan ratifikasi terhadap hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan standar internasional dan Eropa. Namun, pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi. Menurut dari laporan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) terdapat sebelas kasus ancaman dan penyerangan terhadap pekerja media, pembela HAM, kelompok LGBT dan penyerangan terhadap individu yang menyampaikan pendapatnya. Kasus kekerasan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Ukraina masih sering terjadi dan menjadi masalah yang belum bisa ditangani oleh Ukraina khususnya kasus mengenai pelanggaran terhadap perempuan.
- 4) Pemenuhan kelompok minoritas: Zelensky mengeluarkan kebijakan untuk mengesahkan undang-undang bahasa, undang-undang ini mengatur tentang kewajiban untuk menggunakan bahasa Ukraina. Media berita juga harus menyiarkan atau menulis berita menggunakan bahasa Ukraina. Undang-undang ini bertentangan dengan pemenuhan kelompok minoritas dan tidak sesuai dengan Komisi Venesia. Melihat data dari Uni Eropa tentang proposal keanggotaan Ukraina, Ukraina telah melakukan reformasi mengenai pemenuhan kelompok minoritas yang sudah sesuai dengan Komisi Venesia. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan situasi, dimana Ukraina mengesahkan undang-undang bahasa yang sudah jelas merupakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

## KRITERIA EKONOMI

Integrasi ekonomi dengan Uni Eropa semakin berkembang sejak pelaksanaan *Association Agreement (AA)/Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA)*. Ekspor Ukraina ke Uni Eropa telah meluas cakupannya sejak 2015, dilihat dari perusahaan pengekspor terdapat 14.238 perusahaan pengekspor pada tahun 2021, meningkat sebesar 22% dari tahun 2015. Pangsa ekspor ke Uni Eropa terdiri dari produk pertanian logam dan mineral, yang meningkat dari 28% pada tahun 2015 menjadi 36% pada tahun 2021. Untuk Impor dari Uni Eropa berupa mesin, bahan kimia, dan mineral. Meningkat dari 36% pada 2015 menjadi 41% pada 2021. Sebagai anggota WTO sejak 2008, Ukraina memiliki kebijakan perdagangan yang relatif terbuka. (European Commission, 2022)

Perang yang terjadi juga berdampak pada ekspor dan impor Ukraina. Ukraina memiliki beberapa barang yang penting dalam melakukan ekspor seperti sereal, logam besi, mineral dan lemak minyak hewani dan tumbuhan. Dalam impor Ukraina juga memiliki beberapa barang terpenting dalam melakukan aktifitas impornya berupa bahan bakar mineral, mesin dan produk kimia. Berikut data ekspor dan impor Ukraina pada tahun 2021 dan 2022 setelah invansi terjadi.

Tabel data ekspor Ukraina setelah invasi Rusia

<b>Barang ekspor Ukraina</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>Januari-september 2022 (%)</b>
Sereal	18%	19%
Logam Besi	21%	12%
Mineral	12%	11%
Lemak minyak hewani dan tumbuhan	10%	13%
Jumlah ekspor (100%)	61%	55%

*Sumber : Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT)*

Berdasarkan dari tabel diatas, menunjukkan bahwa data ekspor Ukraina mengalami dampak penurunan akibat perang. Ekspor Ukraina sebelum terjadinya perang pada tahun 2021 sereal 18%, logam besi 21%, mineral 12% dan lemak minyak hewan tumbuhan 10%. Ekspor Ukraina setelah invansi pada periode Januari-September 2022 mengalami penurunan sereal 19%, logam besi 12%, mineral 11% dan lemak minyak hewani dan tumbuhan 13%.

Tabel data impor Ukraina setelah invasi Rusia

<b>Barang Impor Ukraina</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>Januari-September 2022 (%)</b>
Bahan bakar mineral	20%	23%
Mesin	20%	16%
Produk Kimia	13%	12%
Jumlah (100%)	53%	51%

*Sumber: Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT)*

Berdasarkan tabel diatas, perang bukan hanya memberikan dampak terhadap ekspor akan tetapi impor Ukraina juga mengalami penurunan. Ada beberapa barang impor penting Ukraina yaitu bahan bakar mineral, mesin dan produk kimia. Nilai impor Ukraina pada tahun 2021 bahan bakar fosil 20%, mesin 20% dan produk kimia 13% dan pada tahun 2022 bahan bakar mineral 23%, mesin 16% dan produk kimia 12%.(Heinonen & Korhonen, 2023)

Dari data kedua diatas menunjukkan bahwa ekonomi Ukraina mengalami penurunan akibat perang yang terjadi khususnya pada impor dan ekspor Ukraina. pada tahun 2021 jumlah ekspor Ukraina sebesar 61% turun 6% menjadi 55% pada tahun 2022. Kemudian jumlah impor Ukraina pada tahun 2021 53% turun menjadi 51%. Dampak perang dalam



bidang ekonomi khususnya mengenai impor dan ekspor mengalami penurunan namun Ukraina mampu membuat impor dan ekspornya kembali stabil.

#### PENYELARASAN LEGISLATIF (*ACQUIS COMMUNAUTAIRE*)

Implementasi Perjanjian Asosiasi tidak lepas dari negara anggota Uni Eropa melalui dewan asosiasi dan komite. Komite asosiasi Parlemen Uni Eropa-Ukraina melibatkan Parlemen Uni Eropa dan Parlemen Ukraina dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Mengikuti adopsi metodologi pembesaran yang direvisi untuk tujuan kebijakan pembesaran Uni Eropa, akuisisi Uni Eropa disusun dalam enam kelompok, akuisisi secara substansial dicakup oleh Perjanjian Asosiasi/DCFTA. Ukraina mendekati akuisisi Uni Eropa yang ada dan mengimplementasikannya secara keseluruhan, meskipun kemajuannya tidak merata.

Klaster fundamental berisi tentang kehakiman hak-hak dasar, kebebasan dan keamanan, pengadaan publik, dan kontrol keuangan merupakan bagian dari kriteria politik dan ekonomi. Klaster pasar berisi tentang pergerakan bebas barang, pekerja, hak pendiri dan pergerakan bebas modal. Pada klaster ini Ukraina membuat kemajuan dalam menyelaraskan akuisisi Uni Eropa pada hambatan teknik perdagangan yang bertujuan untuk mematuhi standar Uni Eropa tentang keamanan produk. Pada klaster daya saing dan pertumbuhan mencakup tentang kebijakan ekonomi dan moneter, kebijakan sosial dan ketenagakerjaan, kebijakan perusahaan dan industri dan beberapa kebijakan lainnya termasuk pendidikan dan budaya. Dalam klaster ini Ukraina melakukan reformasi sektoral yang pada akuisisi Uni Eropa dalam *Digital Single Market* (DSM). (European Commission, 2022)

Klaster tentang *Green Agenda* lebih berfokus dalam masalah perubahan iklim, energi dan lingkungan. Keanggotaan Ukraina di komunitas energi telah memberikan dorongan dalam proses perkiraan undang-undang yang mencakup akuisisi Uni Eropa. Pada Maret 2022 Ukraina telah menyepakati peningkatan ekspor listrik, Ukraina memiliki potensi besar dalam memproduksi energi terbarukan dan mengembangkan ekonomi *hydrogen* bersih. Dengan ini mampu membuat Uni Eropa mengurangi ketergantungan pada energi bahan bakar fosil Rusia sejalan dengan rencana REPowerEU serta memitigasi masalah likuiditas pada sektor energi. Pada tahun 2021 kesepakatan antara Uni Eropa dengan Ukraina tentang *green agenda* menunjukkan minat dan dedikasinya terhadap permasalahan lingkungan hal ini memungkinkan transisi hijau negara mencapai target iklim baru sejalan dengan Perjanjian Paris. (European Commission, 2022)

Jika dilihat dari Kriteria Kopenhagen yang menjadi syarat keanggotaan Uni Eropa. Ukraina masih belum memenuhi kriteria politik sebagai syarat keanggotaan Uni Eropa. Namun, disisi lain Ukraina sudah mendapatkan status kandidat keanggotaan Uni Eropa. Pemberian status kandidat Ukraina ini didasarkan beberapa faktor yang pertama invasi Rusia ke Ukraina dan kedua karena adanya dukungan dari *European People's Party* (EPP).

EPP merupakan kelompok kepentingan yang mampu mengubah kebijakan Uni Eropa. Kepentingan EPP menjadikan Ukraina sebagai kandidat Uni Eropa dikarenakan EPP ingin Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Kekhawatiran EPP terhadap masa depan Ukraina sebenarnya secara tidak langsung terkait dengan kekhawatirannya terhadap masa depan hubungan Uni Eropa, NATO dan Federasi Rusia, yang berarti benua Eropa membutuhkan

keamanan politik yang memadai sehingga menjadikan Ukraina menjadi anggota NATO akan memberikan beberapa keuntungan. (Party, 2023a)

1. Untuk memperkuat militer NATO. Angkatan bersenjata militer Ukraina yang teruji dan diperlengkapi baran akan memberikan nilai tambah bagi militer.
2. Untuk menyatukan kolektif barat dan untuk menjamin perdamaian berkelanjutan di benua Eropa, karena zona demokrasi non-agresif yang stabil akan diperluas ke arah timur.
3. Menjadikan Ukraina menjadi anggota NATO dengan tujuan untuk mencegah balas dendam yang mungkin terjadi di masa depan.
4. Untuk menghentikan ekspansionisme neo-imperialis Rusia tentang perubahan dalam kebijakan Rusia di dalam negeri.

## KESIMPULAN

Upaya integrasi yang dilakukan oleh Ukraina ke dalam keanggotaan Uni Eropa harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan yaitu Kriteria Kopenhagen yang menjadi syarat keanggotaan Uni Eropa. Namun, dalam memenuhi kriteria tersebut Ukraina masih belum memenuhi kriteria politik. Menurut data dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) dalam memenuhi demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM) dan pemenuhan kelompok minoritas Ukraina masih belum memenuhi kriteria politik. Banyaknya tindakan pelanggaran seperti adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam Parlemen, korupsi di Pemerintah masih belum bisa diatasi dan adanya tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dengan mengesahkan undang-undang bahasa. Dengan demikian, Ukraina dalam memenuhi Kriteria Kopenhagen masih belum memenuhi kriteria politik.

Ukraina saat ini sudah mendapatkan status kandidat keanggotaan Uni Eropa, pemberian status kandidat diberikan oleh Uni Eropa bukan karena Ukraina memenuhi Kriteria Kopenhagen melainkan dikarenakan adanya beberapa faktor pendorong pemberian kandidat status yaitu invasi Rusia ke Ukraina dan adanya dukungan dari *European People's Party* (EPP).

## REFERENSI

- Ananta, S. F. (2017). Dampak Kudeta Presiden Viktor Yanukovich Dalam Hubungan Luar Negeri Ukraina Dengan Uni Eropa. *International & Diplomacy*, 3(1), 139–166.
- Ardianto, Y. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Benditt, T. M. (1975). The Concept of Interest in Political Theory. *Political Theory*, 3.
- Catherin, T. (2022). *NThe Russia-Ukraine war is almost two weeks old. This is how we got here*. Australian Broadcasting Corporation. <https://www.abc.net.au/news/2022-03-08/war-in-ukraine-russia-timeline-two-weeks/100889094>
- Dewi, A. K. (2016). *Kepentingan Uni Eropa Dalam Enlargement Kroasia Tahun 2013*. [https://repository.unair.ac.id/87619/5/JURNAL\\_AGNEZIA\\_KARTIKA\\_071511233045.PDF.pdf](https://repository.unair.ac.id/87619/5/JURNAL_AGNEZIA_KARTIKA_071511233045.PDF.pdf)
- Egyankosh.ac. (n.d.). *Unit 24 Interest Groups , Pressure*. 127–128. <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/43947/1/Unit-24.pdf>
- Eqqi, S. (2022). *Zelenskyy “Ngarep” UE Segera Terima Keanggotaan Ukraina*. CNBC News. [bc.net.au/news/2022-03-08/war-in-ukraine-russia-timeline-two-weeks/100889094](https://www.abc.net.au/news/2022-03-08/war-in-ukraine-russia-timeline-two-weeks/100889094)
- European Commission. (n.d.). *Accession criteria European Commission - Enlargement - Accession criteria*. [https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/glossary/accession-criteria\\_en](https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en)

- European Commission. (2021). *EU/Ukraine Partnership and Cooperation Agreement*. <https://cordis.europa.eu/article/id/2672-euukraine-partnership-and-cooperation-agreement>
- European Commission. (2022). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Commission Opinion on Ukraine's application for membership of the European Union. *Europolity*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0407&qid=1655752361844>
- European External Action Service. (2014). *Quick Guide to the Association Agreement*.
- Farah, M. (2005). *THE ROLE OF INTEREST GROUPS IN THE EUROPEAN UNION'S DECISIONMAKING: ALCOHOL POLICY AS A CASE STUDY*. [https://www.drugsandalcohol.ie/4453/1/MA Thesis MF2.pdf](https://www.drugsandalcohol.ie/4453/1/MA%20Thesis%20MF2.pdf)
- Fund, U. W. (2011). *Women's Participation in Politics and Decision-Making in Ukraine: Strategy Paper*.
- Gaol, D. F. L. (2016). Proses Pengajuan Bosnia Herzegovina Menjadi Anggota Uni Eropa. *Democracy*, 12(2005), 17–25. <http://semnas.fdi.or.id/wp-content/uploads/2017/02/HP-03-Denada-Faraswacyen.pdf>
- Gjeta, A. (2020). *The EU Enlargement : Theory and Practice The EU Enlargement : Theory and Practice*. October, 1–3. [https://www.researchgate.net/publication/344636965\\_The\\_EU\\_Enlargement\\_Theory\\_and\\_Practice](https://www.researchgate.net/publication/344636965_The_EU_Enlargement_Theory_and_Practice)
- Greenwood, J. (2003). *Interest Representation in the European Union*. Palgrave, Macmillan.
- Heinonen, L., & Korhonen, I. (2023). *The effects of the war on the Ukraine economy: The situation at the end of 2022 Bank*. 1, 42–43.
- Ikhsan, Y. Q. B. (2019). Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa. *Journal of International Relations*, 5(3), 587–591. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/24165/21915>
- Indicators, W. G. (n.d.). *Interactive data access*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- Indonesia, C. (2023). *Geger Korupsi Ukraina, Wakil Menteri Dipecat usai Kena OTT Suap Rp6 M*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230124083856-134-904050/geger-korupsi-ukraina-wakil-menteri-dipecat-usai-kena-ott-suap-rp6-m>
- Janda, K., Berry, J., & Goldman, J. (1997). *The Challenge of Democracy*. Houghton Mifflin.
- Jozwiak, R. (n.d.). *After Four Years of Drama, EU-Ukraine Association Agreement Comes into Force*. <https://www.rferl.org/a/eu-ukraine-association-agreement-goes-into-force-after-four-years-drama/28708426.html>
- Litra, L., & Getmanchuk, A. (2020). *One Year of Zelensky 's Presidency. One Step Forward, One Step Back*.
- Nuechterlein, D. E. (1979). *National Interest: A new Approach*. Spring.
- Party, E. P. (n.d.-a). *Committed to creating a stronger Europe*. <https://www.eppgroup.eu/about-us>
- Party, E. P. (n.d.-b). *Elected locally to represent your interests in Europe*. <https://www.eppgroup.eu/about-us>
- Party, E. P. (n.d.-c). *Work towards granting EU candidate status to Ukraine*. <https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/work-towards-granting-eu-candidate-status-to-ukraine>
- Party, E. P. (2022a). *EU urged to grant Ukraine and Moldova candidate status*. <https://www.eppgroup.eu/how-we-make-it-happen/with-eu-countries/ireland/news/eu-urged-to-grant-ukraine-and-moldova-candidate-status>
- Party, E. P. (2022b). *Give Moldova EU candidate status and get to work*. <https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/give-moldova-eu-candidate-status-and-get-to-work>
- Party, E. P. (2022c). *Ukrainians and Zelensky for Sakharov Prize*. <https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/ukrainians-and-zelensky-for-sakharov-prize>
- Party, E. P. (2023a). *EPP Group Position Paper on Ukraine's NATO Perspective*. <https://www.eppgroup.eu/newsroom/publications/epp-group-position-paper-on-ukraine->

- s-nato-perspective
- Party, E. P. (2023b). *Start accession negotiations with Ukraine*. <https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/start-accession-negotiations-with-ukraine>
- Puspasari, I. (2020). Peran Uni Eropa sebagai Institusi Supranasional dalam Krisis Ukraina Tahun 2014-2019. *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(01), 77–79. <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i01.2173>
- Rahim, F. (2013). Clash of Civilisations: Hambatan Akses Turki ke Uni Erpa. *Global & Policy*, 1, No.2(2), 214–227. [http://eprints.upnjatim.ac.id/4859/1/14.\\_214-227\\_Faidah\\_Rahim\\_-\\_Clash\\_of\\_Civilizations\\_-\\_Hambatan\\_Akses\\_Turki\\_ke\\_Uni\\_Eropa.pdf](http://eprints.upnjatim.ac.id/4859/1/14._214-227_Faidah_Rahim_-_Clash_of_Civilizations_-_Hambatan_Akses_Turki_ke_Uni_Eropa.pdf)
- Rankin, J. (2022). 'Ukraine's future is in the EU': Zelenskiy welcomes granting of candidate status. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/eu-leaders-ukraine-candidate-status-russian-attack>
- Sapir, A. (2022). Ukraine and the EU: Enlargement at a New Crossroads. *Intereconomics*, 57(4), 213–217. <https://doi.org/10.1007/s10272-022-1065-2>
- Shasdia, O. R. (2019). *PENETAPAN KOSOVO SEBAGAI KANDIDAT POTENSIAL KEANGGOTAAN UNI EROPA*. [https://repository.unair.ac.id/87289/5/Jurnal\\_Olivia\\_Rahma\\_Shasdia\\_Genap\\_1819.pdf](https://repository.unair.ac.id/87289/5/Jurnal_Olivia_Rahma_Shasdia_Genap_1819.pdf)
- Suwarman, E. M. (n.d.). Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok Di Myanmar. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), 182. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/download/1071/905/>
- Szyszczyk, R. D. & E. (2022). *Ukraine's accession to the European Union: what difference would it make?* <https://www.economicsobservatory.com/ukraines-accession-to-the-european-union-what-difference-would-it-make>
- Welle, D. (2014). *Ukraine ratifies EU trade pact*. <https://www.dw.com/en/ukraine-ratifies-eu-association-agreement/a-17925681>
- Wolczuk, K. (2014). *Ukraine and the EU: turning the Association Agreement into a success story.* *European Policy Centre*. 1.